

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibu kota merupakan pusat pemerintahan. Peran ini membuat ibu kota sebagai simbol suatu negara. Selain itu, ibu kota juga sebagai pusat perekonomian dan administrasi nasional. Oleh sebab itu, mayoritas negara di dunia ingin membuat ibu kotanya menjadi simbol dinamika kehidupan sosial dan ekonomi guna menciptakan daya tarik kepada investor asing dalam upaya peningkatan produktivitas dalam negara tersebut. Akan tetapi, tipe-tipe pemerintahan mampu mempengaruhi peran ibu kota itu sendiri (Rasyid, 2019). Jakarta yang telah menjadi ibu kota negara dari tahun 1964, merujuk pada ketetapan UU Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964, terkait Pernyataan DKI (Daerah Khusus Ibu kota) Jakarta Raya yang menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Hal ini menjadikan Jakarta sebagai pusat kota dan menjadi daya tarik bagi berbagai lapisan masyarakat dengan harapan mengadu nasib ataupun berusaha mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik secara ekonomi di ibu kota. Namun, adanya perpindahan masyarakat ke Jakarta secara besar dan tidak terarah mengakibatkan kepadatan penduduk, yang pastinya berdampak pada tata kelola kota yang baik. Hal ini juga tentu menimbulkan berbagai permasalahan yang ada di kawasan Ibu Kota Jakarta yang tak kunjung dapat diselesaikan hingga saat ini.

Permasalahan kemacetan di Jakarta dan sederet permasalahan lingkungan seperti banjir, ketersediaan air bersih, sampah yang melimpah, polusi udara

ataupun kualitas udara yang buruk, daerah resapan air yang beralih fungsi menjadi bangunan, dan kurangnya RTH (Ruang Terbuka Hijau) (Metrotvnews, 2023). Ahmad Safrudin sebagai Direktur Eksekutif KPBB, mengatakan masalah kualitas udara di Jakarta sudah mencapai tingkat yang dapat dikatakan “sangat krisis” (BBC, 2023). Kondisi udara Jakarta pada 2 Oktober 2023 tergolong kategori “tidak sehat” dengan Indeks Kualitas Udara (AQI) 163, berdasarkan pengukuran oleh perusahaan teknologi kualitas udara asal Swiss, iQAir. Jakarta adalah kota yang mempunyai kualitas udara terburuk kedua di dunia dan juga hal ini mengakibatkan permasalahan pernafasan dan kesehatan di masyarakat (CNN, 2023).

Tidak peduli akan berbagai permasalahan yang ada, Ibu Kota Jakarta seperti mempunyai magnet tersendiri karena selain menjadi pusat pemerintahan, Jakarta adalah pusat bisnis dan perdagangan, sehingga kepadatan penduduk pun terus meningkat dan menambah beban serta permasalahan Jakarta sebagai ibu kota. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), banyaknya penduduk DKI Jakarta menyentuh angka 10,67 juta pada 2022. Jumlah penduduk DKI Jakarta terus meningkat dalam satu decade terakhir, karena pada 2012, jumlah penduduk Jakarta baru mencapai 9,86 juta jiwa, sehingga terdapat peningkatan sebesar 8,2% jumlah penduduk DKI Jakarta pada kurun waktu satu dekade terakhir (Databoks, 2023). Indonesia mempunyai kelemahan dalam manajemen Perkotaan. Buruknya manajemen kota di Indonesia, salah satunya adalah permasalahan urbanisasi yang tinggi dan tidak terarah. Munculnya stigma bahwa apabila ke Jakarta ataupun ke kota

besar bisa meraih kesuksesan, juga menjadi problem tersendiri. Masyarakat yang tidak mempunyai keahlian khusus, tidak percaya bahwa mereka juga bisa turut serta membangun daerah nya sendiri, namun hanya mencari peruntungan di ibu kota. Akibatnya permasalahan kesenjangan sosial, kepadatan penduduk yang menyebabkan pemukiman kumuh, dan kriminalitas yang tinggi menyebabkan gagalnya manajemen perkotaan. Hal semacam ini seharusnya menjadi acuan yang harus diperhatikan dan diselesaikan pemerintah sebelum melihat jauh urgensi pemindahan ibu kota ke Kalimantan (Hutasoit, 2018).

Ibu kota negara sebelumnya, yakni Jakarta terlihat sudah tidak sanggup memikul beban berat sebagai ibu kota negara, karena sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kota dan memiliki problematika yang beragam dan tata kelola kota yang tidak cukup baik. Menurut Presiden, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Yang kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan (Setkab, 2019). Begitu banyak berbagai permasalahan kompleks di Jakarta sebagai ibu kota yang ditandai dengan ketidakmampuan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Pemerintah pusat maupun daerah dinilai tidak cukup baik dalam mengelola tata ruang, arus perpindahan masyarakat serta lingkungan hidup. Demikian juga dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Jakarta, saat ini

dengan berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk Jakarta. Namun, berbagai permasalahan seperti kemacetan, banjir, dan permasalahan lingkungan lainnya belum dapat terselesaikan. Belum lagi, ketidakmampuan memberikan tempat maupun hunian yang layak bagi warga yang terpinggirkan dan munculnya daerah kumuh di ibu kota. Berbagai permasalahan yang terjadi di Jakarta merupakan pertanda bahwa Jakarta sudah tidak begitu ideal sebagai ibu kota negara.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur saat ini sudah masuk dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024. Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden) tentang pemindahan ibu kota DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 mendatang dan pada saat itulah ibu kota akan berpindah dari Jakarta ke Nusantara (Kompas, 2022). Pemerintah juga sudah mengesahkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang resmi disahkan melalui rapat paripurna DPR pada 18 Januari 2022 (Shelly Novi Handarini, Amelia Agusni, 2022). Melihat berbagai permasalahan yang ada di ibu kota sebelumnya Jakarta pada saat ini, dengan berbagai permasalahan lingkungannya. Adanya pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru dalam tata kelola pemerintahan, menjadi hal yang harus diperhatikan dengan serius terkait urgensi dan tujuannya, agar pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru tidak sia-sia dan sesuai dengan tujuannya. Dalam mencapai

tujuannya, maka diperlukan peraturan dan pengambilan kebijakan yang tepat oleh pemerintah. Hal ini akan menjadi semakin sulit, apabila tidak adanya peraturan, tindakan dan kebijakan yang tepat untuk menjaga dan mewujudkan kelestarian ekologi di wilayah ibu kota negara baru.

Ibu kota negara yang biasanya cenderung dengan perkotaan dan gedung tinggi dikhawatirkan dapat menghilangkan kelestarian lingkungan di daerah sekitarnya, terlebih banyak di sekitar kawasan ibu kota negara baru adalah hutan. Ibu kota negara baru yang nantinya akan menjadi representasi dari negara Indonesia, harus terus diamati perkembangannya dengan berbekal kajian-kajian strategis oleh para ahli, masyarakat, dan berbagai pihak yang peduli dan sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan. Bagaimana menjadi ibu kota yang ideal dan memiliki tata kelola kota yang baik. Pembangunan Ibukota baru hendaknya memperhatikan sisi kelestarian ekologi. Yang artinya, kelestarian lingkungan tidak boleh diabaikan karena salah satu faktor kunci tata kelola perkotaan yang berkelanjutan (Greenpeace, 2019). Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk mewujudkan ibu kota baru yang memperhatikan kelestarian ekologi dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakatnya.

Isu lingkungan menjadi salah satu perhatian utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembangunan infrastruktur IKN, diprediksi berpotensi membawa dampak lingkungan, di antaranya mengganggu biodiversitas, kualitas lanskap wilayah, menurunnya stok karbon hutan, ketersediaan air, pencemaran, limbah, kebisingan, sampah, dan

sistem drainase. Selain berdampak pada lingkungan, pembangunan IKN juga berpotensi membawa dampak pada kehidupan sosial seperti konflik lahan, akibat perburuan properti lahan dan penggunaan lahan secara ilegal (Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, 2022). Terkait hal ini, pemerintah harus terus menganalisa dengan pertimbangan berbagai ahli dan elemen masyarakat serta mengambil solusi dan kebijakan terbaik guna mewujudkan kelestarian ekologi, namun juga menyediakan fasilitas serta sarana dan prasarana untuk masyarakat. Hal ini tentu dilakukan untuk memenuhi hak-hak hidup dari masyarakatnya. Namun, tidak jarang kebutuhan masyarakat bertentangan langsung terhadap kelestarian ekologi dan lingkungan hidup. Hal seperti itu, menjadi problematika dan dilema bagi pemerintah, yang ingin berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, namun dilain sisi juga bertentangan dengan sistem keberlanjutan ekologi. Menurut (Nugroho, 2009) akar permasalahan yang sering terjadi dalam pengembangan tata kelola kota seperti di Indonesia adalah terus bertumbuhnya populasi (*growth*) yang tidak bisa dipisahkan pula dengan tingginya permintaan akan ruang (*space*). Permasalahan ini memang terkadang sulit untuk terselesaikan, namun dilihat dari beragam permasalahan yang sudah terjadi di ibu kota sebelumnya, seharusnya pemerintah mampu membuat dan menerapkan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan keberlanjutan masyarakat maupun lingkungan hidupnya di IKN.

Upaya mewujudkan kelestarian ekologi dalam tata kelola perkotaan mempunyai tantangan yang cukup sulit dan besar. Tantangan tersebut salah satunya adalah bagaimana pemerintah mampu memanfaatkan sumber daya

alam. Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan mempunyai dua gagasan penting, yakni kebutuhan yang diartikan sebagai suatu hal yang menjadi ketergantungan dan bersifat wajib dipenuhi yang berasal dari sumber daya alam sebagai penyedia kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, yang kedua adalah keterbatasan, yakni keterbatasan alam dalam mencukupi kebutuhan manusia hari ini dan dimasa yang akan datang (Suganda et al., 2014). Melihat hal diatas, mewujudkan ibu kota baru dengan kelestarian ekologi tentu menjadi suatu tantangan yang cukup sulit, mengingat gagalnya Jakarta menjadi ibu kota negara dengan tata kelola kota yang baik, terlebih ditinjau dari kelestarian lingkungannya. (WALHI) menyatakan bahwa dalam pembangunan Ibukota Negara Baru juga ada beberapa permasalahan lingkungan yakni ancaman tata kelola air, tumbuh-tumbuhan dan hewan, resiko perubahan iklim, dan ancaman terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di wilayah ibu kota negara baru (CNN, 2022).

Adanya kesadaran lebih dari masyarakat terhadap dampak kerusakan lingkungan hidup di negara yang masih berkembang, sehingga menyebabkan adanya eksploitasi SDA / sumber daya alam yang bakal jadi ancaman untuk kelestarian lingkungan hidup menimbulkan adanya perlawanan dari berbagai elemen masyarakat. Masyarakat yang bergabung menjadi LSM atau organisasi masyarakat, kemudian turut mengerjakan apa yang dilakukan oleh gerakan lingkungan. Tujuan adanya aktivitas gerakan lingkungan yakni guna menyadarkan masyarakat terkait dampak kerusakan lingkungan dan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Mereka bahkan juga mengerjakan

resistensi kepada swasta, pemerintah maupun berbagai pihak lainnya yang dengan tidak langsung ataupun langsung mempunyai andil dari kerusakan lingkungan hidup yang timbul. Organisasi dan gerakan lingkungan ini bukan semata-mata organisasi yang bersifat lokal, namun mereka sering kali mempunyai koneksi yang terhubung dan sifatnya nasional dan bahkan internasional menjadi hal yang menarik. Menguatnya sektor ketiga (*civil society organization (CSO)/civil society association (CSA)*, LSM) ini adalah fenomena kekuatan gerakan sosial baru yang semakin kuat semenjak adanya gejala *deep distrust* kepada organisasi politik konvensional seperti lembaga perwakilan rakyat, negara, dan birokrasi (Rochwulaningsih et al., 2017).

Dalam praktiknya salah satu gerakan lingkungan yang *concern* terkait isu IKN (Ibu Kota Nusantara) dan aktif berperan membantu mewujudkan kelestarian ekologi di Indonesia adalah WALHI. Organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau biasa dikenal dengan WALHI yang mempunyai anggota sejumlah 487 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah / *NGO (Non Government Organization)* dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Di daerah wilayah ibu kota negara baru, WALHI Regional Wilayah Kalimantan Timur juga aktif membantu mewujudkan kelestarian ekologi di wilayah tersebut. WALHI Nasional maupun regional saling bekerja sama untuk mewujudkan hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup. Sejak tahun 1980 hingga saat ini, WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan

hidup di Indonesia. WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara atas pemunahan sumber-sumber kehidupan rakyat (Walhi, 2023).

Menjaga dan mewujudkan kelestarian ekologi di kawasan ibu kota negara baru merupakan tanggung jawab besar pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, karena jika gagal menjaga dan mempertahankan lingkungan di wilayah tersebut atau bahkan merusaknya, hal ini sangat disayangkan bagaikan peribahasa “gali lubang tutup lubang” apabila pemasalahan kota di Jakarta muncul kembali di ibu kota negara baru, Nusantara, Kalimantan Timur dan menjadi “Jakarta Jilid II”. Terlebih, proyek maupun kebijakan ini menelan dana yang tidak sedikit, yakni sekitar 25% dari jumlah Realisasi Pendapatan Negara pada tahun 2021 yang nilainya Rp 2.000 triliun. Hal tersebut dikaenakan biaya yang bakal digunakan untuk membangun IKN mencapai sekitar US\$35 miliar atau sekitar Rp 500 triliun. Kemudian sisa kurangnya anggaran akan diupayakan dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan investasi langsung (Elsam, 2022).

Kebijakan pemerintah yang telah diambil dengan adanya pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur, mendorong dan menjadi alasan ketertarikan kuat penulis untuk meneliti dan melihat bagaimana upaya-upaya politik yang dilakukan gerakan lingkungan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) agar dapat terwujudnya kelestarian ekologi di IKN (Ibu Kota Nusantara). Mewujudkan kelestarian ekologi di IKN (Ibu Kota Nusantara)

melalui peran upaya-upaya politik gerakan lingkungan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menjadi fokus utama penulisan ini. Harapannya penelitian ini dapat memberi wawasan yang lebih kepada pemerintah dan seluruh elemen masyarakat terkait permasalahan ini, sehingga pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menjadi lebih mengerti dan sadar terkait isu lingkungan di IKN serta dapat membantu dalam upaya terwujudnya kelestarian ekologi di IKN. Diharapkan juga semakin masifnya gerakan lingkungan yang ada di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan melihat bagaimana upaya-upaya politik yang dilakukan melalui gerakan lingkungan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dalam mewujudkan kelestarian ekologi di IKN (Ibu Kota Nusantara)?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana upaya-upaya politik yang dilakukan melalui gerakan lingkungan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dalam mewujudkan kelestarian ekologi di IKN (Ibu Kota Nusantara).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait bagaimana upaya-upaya politik yang dilakukan melalui *NGO (Non Governmental Organization)*, yakni gerakan lingkungan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dalam mewujudkan kelestarian ekologi di IKN

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait pentingnya menjaga dan mewujudkan kelestarian ekologi di suatu kota, khususnya (Ibu Kota Nusantara)
- b. Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat terkait pentingnya mewujudkan kelestarian ekologi di suatu kota, khususnya IKN (Ibu Kota Nusantara)
- c. Memberikan sudut pandang bagi pemerintah dan masyarakat terkait bagaimana upaya-upaya politik gerakan lingkungan WALHI dalam menjaga kelestarian ekologi di IKN (Ibu Kota Nusantara).

E. Kajian Pustaka (Literature Review)

Tabel 1. Kajian Pustaka

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Safira Fitranza (2022)	Komunikasi Politik Wahana	Hasil penelitian ini menunjukkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

		<p>Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Melalui E- Newsletter dalam Isu Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia Tahun 2019</p>	<p>ikut serta merespon isu kebakaran hutan dan lahan yang tengah terjadi. Melalui berbagai aksi seperti melakukan gugatan, pertemuan dengan pemerintah, hingga kampanye. Kemudian kegiatan tersebut dipublikasikan melalui berbagai platform salah satunya adalah e-newsletter pada website Walhi. Hasil dari penelitian ini Walhi melakukan komunikasi politik secara langsung dalam penyampaian pesan kepada pemerintah maupun perusahaan yang merusak alam seperti ketidaksetujuan atas kebijakan yang dibuat, proyek pemerintah maupun swasta yang berdampak bagi lingkungan, kritik tentang kecurangan – kecurangan politik terhadap lingkungan, dan sebagainya melalui web WALHI yang sudah diupload terkait e-newsletter</p>
2	<p>Irhash Ahmady, Ari Ganjar Herdiansah, dan Husin Al-Banjari (2022)</p>	<p>Gerakan Lingkungan dan Partai Politik: Studi Tentang Perjuangan</p>	<p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pendirian PHI oleh WALHI berasal dari pemikiran persoalan lingkungan yang saling terhubung antara lain dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Produk</p>

		Walhi dalam Pembentukan Partai Hijau	<p>politik yang buruk dalam aspek tata kelola lingkungan adalah hal utama yang menjadi dasar guna memperkuat green politics di Indonesia. Dengan hal itu, diharapkan dalam proses politik yang ada dapat menghasilkan produk politik yang memperhatikan aspek tata kelola lingkungan yang terdapat nilai-nilai sustainability. Dalam pendirian PHI, WALHI adalah kelompok kepentingan yang memilih untuk tidak menjadi partai politik. Konsistensi WALHI sebagai organisasi non pemerintah membuat WALHI menjadi lebih leluasa dalam menjalankan kerja-kerja green politics. Namun, hal itu sudah dilalui dengan serangkaian kontestasi ideologi dalam internal WALHI khususnya dari kelompok pro politik praktis dan kelompok pro gerakan lingkungan.</p>
3	David Ardhian, Soeryo Adiwibowo, dan	Peran dan Stategi Organisasi Non	<p>Hasil Penelitian ini mengungkap bahwa ORNOP mampu memanfaatkan keluhan kolektif dan struktur kesempatan politik</p>

	Ekawati Sri Wahyuni (2016)	Pemerintahan dalam Arena Politik Lingkungan Hidup	untuk membangun struktur mobilisasi, proses framing dan bentuk-bentuk aksi. Strategi Politik ORNOP diwujudkan dengan cara mempengaruhi secara langsung pihak-pihak kunci, meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintah dengan menggunakan jaringan advokasi lintas negara, mendorong standar keberlanjutan pasar, mempengaruhi aliran kapital, mobilisasi dukungan elit dan mempromosikan praktik-praktik terbaik sebagai solusi tandingan. ORNOP bisa menjalankan kerja menjadi organisasi gerakan sosial guna = mempengaruhi kebijakan, mendorong kesetaraan relasi kuasa penegakan hukum, perilaku pasar dan sektor swasta, serta mempromosikan pengelolaan lahan gambut berbasis masyarakat pada tingkat lokal, dengan tujuan penguatan tata kelola SDA di Indonesia.
4	Yety Rochwulaningsih	Dinamika Gerakan	Penelitian ini menemukan bahwa variasi dalam sejarah gerakan sosial lingkungan di

	(2017)	Lingkungan dan Global Environmental Governance	Indonesia, dalam keseluruhan bisa membantu memperkuat masyarakat sipil, yang pada gilirannya bisa turut memperjuangkan guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat. Berbagai langkah harus ditempuh karena gerakan lingkungan menghadapi tantangan yang signifikan dari faktor-faktor yang bisa merusak lingkungan, seperti kebijakan negara, ekspansi kapitalisme global, maupun gabungan dari dua faktor tersebut. Dalam situasi ini, pelestarian lingkungan tidak hanya harus defensif sifatnya dan "bergerak" ketika kerusakan lingkungan terjadi, dengan sifat ofensiflah dapat mengubah berbagai kebijakan negara yang diharapkan akan berdampak pada kerusakan alam, seperti penambangan di daerah hutan lindung; menjual konsesi penebangan hutan yang tidak terkontrol, mencabut peraturan yang mengingkari kedaulatan rakyat guna menjalankan yang
--	--------	---	--

			<p>diinginkan. Di tingkat institusional , pentingnya satu payung institusi yang mencakup masalah lingkungan hidup harus ditekankan oleh seluruh gerakan lingkungan di Indonesia. Pada saat ini terlalu banyak lembaga seperti Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pertambangan, Sumber Daya Energi dan Mineral, Menteri Pertanian, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, dan lainnya. Lembaga tersebut tidak berkolaborasi dengan baik, mereka sangat lambat menangani masalah lingkungan yang seringkali membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.</p>
5	Alfian Hidayat (2017)	<p>Konstruksi Gerakan Sosial : Efektivitas Gerakan Lingkungan Hidup</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan lingkungan semakin kuat di seluruh dunia. Nilai-nilai umum berasal dari model dan pola gerakan. Fokus utama gerakan ini adalah melawan rezim yang tidak segera dapat menyelesaikan permasalahan, Sejauh mana dan seberapa besar gerakan lingkungan telah berkembang</p>

			merupakan pembahasan penting dalam tulisan ini seperti timbulnya diskusi terkait masalah lingkungan yang kritis pada saat ini, kemudian kampanye "Go Green" hijau serta munculnya kelompok pecinta lingkungan di berbagai negara.
6	Muhammad Wahyudi (2022)	Relasi Pemerintah-Gerakan Sosial: Studi pada Gerakan Lingkungan Jelantah4change	Penyelamatan lingkungan menjadi salah satu area dimana gerakan sosial bisa bekerja sama dengan pemerintah. Hasilnya adalah interaksi yang terjadi antara pemerintah dan Jelantah4Change masih bersifat konsensus. Ke depan, interaksi antara keduanya perlu diwujudkan dalam bentuk tindakan kolaboratif.
7	Etha Pasan (2018)	Politik Pengelolaan Karst Sangkulirang-Mangkalihat: Non Governmental Organization dan Agenda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa strategi yang digunakan Jatam dan Walhi. Yaitu: 1) Protes, 2) Seminar/FGD, dan 3) Kampanye. Itu strategi dipengaruhi akibat dari dalam dan dari luar. Untuk faktor dari dalam, baik struktur organisasi Jatam maupun Walhi menciptakan kemungkinan untuk berkolaborasi dengan pihak lain yang sama

		Kelestarian Lingkungan	<p>agenda untuk mencapai tujuan tersebut.</p> <p>Faktor internal yang kedua adalah pendanaan. Diketahui secara luas bahwa LSM lokal di Kalimantan Timur, khususnya yang memperjuangkan perlindungan lingkungan hidup, kurang memiliki hal tersebut sumber daya keuangan untuk mendanai agenda mereka. Baik milik Jatam maupun milik Walhi sumber daya keuangan relatif kecil dibandingkan dengan sumber daya aktor-aktor terkait seperti Pemerintah dan korporasi. Dengan Dalam kondisi seperti itu, protes jalanan, seminar dan kampanye menjadi hal yang paling utama instrumen rasional yang akan digunakan. Yang terakhir adalah faktor eksternal itu mempertimbangkan konteks sosial dan politik Kalimantan Timur masyarakat yang membuat mereka memilih strategi tersebut.</p>
8	Wesley Liano Hutasoit (2018)	Analisa Pemindahan Ibukota Negara	<p>Penelitian ini menunjukkan terkait informasi tentang pemindahan ibu kota negara, perbandingan juga dilakukan</p>

			<p>dengan negara-negara lain yang berhasil dan gagal melakukan pemindahan ibu kota negara, semuanya di analisa secara deskriptif dalam jurnal penelitian ini.</p> <p>Perjalanan pemindahan ibu kota negara terjadi di beberapa negara dan beberapa negara memiliki kisah sukses dalam upaya mereka memindahkan ibu kota lama ke tempat-tempat baru. Alasan umum pemindahan ibukota adalah pertimbangan sosial ekonomi, pertimbangan politik, dan pertimbangan geografis. Indonesia mempertimbangkan ketiga faktor tersebut dalam analisis untuk memindahkan ibukotanya, tidak hanya analisis di dalam negeri, namun juga analisis dari pengalaman negara lain di dunia yang sudah memindahkan ibukotanya.</p> <p>Pengalaman dari berbagai negara yang telah memindahkan ibukotanya akan memberikan masukan dan pertimbangan yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan analisis yang lebih tepat untuk</p>
--	--	--	--

			mengkaji masalah di Indonesia.
9	Yanti Fristikawati (2023)	Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum	<p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dengan adanya UU 3/2022 serta lampirannya Pemerintah sudah membuat ide gagasan dan pedoman dalam pembangunan wilayah IKN. Upaya untuk mengelola dampak yang merugikan dalam pembangunan IKN juga sudah terlihat dengan adanya AMDAL berdasar KLHS yang sudah ada. Tetapi, dalam pelaksanaannya adanya banyak kepentingan kemungkinan dapat berdampak untuk lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah IKN juga. Pemerintah Daerah khususnya Kalimantan Timur diharapkan bisa menemukan solusi yang konkrit terkait berbagai masalah yang terjadi pada saat ini. Peran tersebut dilakukan dengan membuat peraturan daerah. Kemudian, Indonesia tentu bisa belajar dan membandingkan pembangunan kota yang berhasil di negara lain serta bertanya terkait saran akan hal tersebut.</p>

10	Chandra Adjie Prianggodo (2023)	Pembangunan IKN Sebagai Mercusuar Strategis (Kajian Kritis dalam Perspektif Sustainable Development)	Hasil penelitian mengungkapkan yakni pada pembangunan IKN mempunyai beberapa ancaman permasalahan yang kompleks khususnya pada keberlanjutan dan kelangsungan lingkungan hidup untuk waktu yang lama. Kota Penajam Paser Utara yang menjadi ganti Kota Jakarta pastinya bakal jadi titik strategis yang bakal lebih berkembang dan terus tumbuh sebagai kota metropolitan-megapolitan untuk memenuhi pastinya kebutuhan daerah-daerah penyangga kota dan mendorong kota sekelilignya untuk lebih cepat bertumbuh menjadi lebih maju
11	Robi Cahyadi Kurniawan & Fitria Barokah (2022)	Masa Depan Ekologi Ibu Kota Negara Baru	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terlalu banyak tuntutan perkembangan ekonomi telah mengabaikan keseimbangan lingkungan, menyebabkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan letak geografis Kalimantan Timur, pemerintah berharap untuk menggunakan konsep Hutan Kota saat membangun ibu kota baru ini, mengingat kelemahan ekologis wilayah IKN termasuk

			<p>masalah air bersih, degradasi hutan, banjir, tsunami, dan ancaman habitat satwa. Namun, metode yang akan digunakan pemerintah untuk membangun hunian perkotaan tersebut tanpa mengganggu ekosistem lokal masih tidak jelas. Memang, apa yang terjadi di Kalimantan adalah hasil dari proyek skala besar yang memecah hutan tempat hidup satwa, termasuk menghilangkan koridor ekologi yang penting.</p>
12	Subarudi (2022)	<p>Kebutuhan Standar Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru: Antara Konsepsi dan Impelementasi</p>	<p>Hasil penelitian mengungkapkan terkait konsep pembangunan IKNB yang tepat harus menjalakan konsep forest city guna mengurangi dampak adanya kerusakan lingkungan, khususnya hutan, selama perencanaan dan pembangunan IKNB. Dalam hal tersebut, prinsip forest city harus dijelaskan dalam bentuk kriteria dan kemudian disusun standar dan instrumen LHK. Penerapan standar dan instrumen LHK dilakukan guna memastikan pembangunan kota berjalan</p>

			<p>dengan tetap mempertahankan hutan.</p> <p>Dalam strategi penerapan standar dan instrumen LHK perlu mempertimbangkan empat faktor penentunya, yakni (i) bentuk pengelolaan IKNB, (ii) struktur organisasi IKNB, (iii) ketersediaan SPO dari penerapan standar dan instrumen LHK, dan (iv) pelaksanaan penerapan standar dan instrumen LHK. Monev penerapan standar dan instrumen LHK dan hasilnya bisa digunakan sebagai upaya penyempurnaan konsep standar dan instrumen LHK dengan menggunakan konsep total kontrol kualitas. Hasil monev juga bisa digunakan sebagai masukan yang bermanfaat untuk pengembangan konsep kota hutan, yang dianggap kota hutan yang didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan atau RTH yang mempunyai fungsi jasa ekosistem seperti hutan agar penghuninya bisa hidup harmoni dan beriringan antara satu dengan yang lain.</p>
13	Yanti	Pengaturan dan	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa

	Fristikawati, Rainer Alvander, dan Verrence Wibowo (2022)	Penerapan Sustainable Development pada Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara	kajian tentang aturan dan prinsip yang ada menunjukkan bahwa bila pembangunan IKN dilakukan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan seperti adanya pemerataan, prinsip ekologis, pemanfaatan sumber daya alam dengan bijaksana, maka pembangunan tersebut tidak merusak lingkungan dan dampak terhadap masyarakat sekitar dapat diminimalisir.
14	Dadang Jainal Mutaqin, Muhajah Babny Muslim, dan Nur Hygiawati Rahayu (2021)	Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara	Hasil penelitian ini menjelaskan terkait Konsep Forest City yang sesuai dengan kondisi wilayah IKN adalah kota hutan yang didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan atau RTH yang memiliki fungsi jasa ekosistem seperti hutan dan dengan pendekatan lanskap terhubung untuk membuat kehidupan yang berdampingan dengan alam. Konsep Forest City tersebut dijabarkan menjadi enam prinsip yaitu: 1) konservasi sumber daya alam dan habitat satwa; 2) terkoneksi dengan alam; 3) pembangunan rendah karbon; 4) sumber daya air yang memadai;

			<p>5) pembangunan terkendali (Anti-Sprawl Development); 6) pelibatan masyarakat dalam mewujudkan Forest City. Seluruh prinsip itu diperluas dengan berbagai indikator dan kriteria tertentu guna melihat bahwa prinsip-prinsip itu sudah terlaksana pada rencana pembangunan IKN. Dalam perencanaan dan pembangunan kota, tentu sangat bergantung dengan rencana dan kebijakan yang dibuat. Penerapan Konsep Forest City diharapkan tidak sebatas pada wilayah kota, melainkan bisa terhubung dengan kawasan disekitar kota, khususnya untuk menjalankan keberlanjutan hutan dan lingkungan. Pada intinya kawasan wilayah dan kota yang berdampingan adalah sebuah ekosistem yang mempengaruhi satu sama lain.</p>
15	<p>Budiman, E. Letizia Dyastari, Rita Kala Linggi, Anwar Alaydrus, dan Hendra</p>	<p>Framing Wacana Politik Ekologis: Pembangunan Berkelanjutan</p>	<p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pembangunan IKN yang berkelanjutan dalam aspek ekologis akan sangat sulit dilakukan. Ini dikarenakan hampir wilayah IKN yang akan dibangun adalah lahan</p>

	Saputra (2022)	Ibu Kota Negara Baru Indonesia	<p>konsensi pertambangan batu bara.</p> <p>Banyaknya lubang tambang batu bara yang ada di wilayah administrasi IKN justru membuktikan bahwa pemerintah berupaya menutupi ruang kosong perusahaan yang tidak mampu melakukan reklamasi dan rehabilitasi eks tambang. Alih-alih menciptakan framing forest city, justru pembangunan yang dilakukan hanya untuk kepentingan semata. Selain itu pembangunan berkelanjutan yang menysasar ekonomi, sosial dan ekologis. Sampai saat ini seringkali tidak menemukan titik temu.</p> <p>Pembangunan yang mementingkan ekonomi akan membuat aspek sosial dimasyarakat mengalami peningkatan daya saing dan membuat gap antara si kaya dan miskin semakin jauh. Selain itu juga pembangunan yang hanya fokus kepada ekonomi juga cenderung membuat lingkungan semakin krisis. Pembangunan yang menekankan pada aspek ekonomi dan social, maka kerusakan lingkungan juga tak</p>
--	----------------	-----------------------------------	--

			dapat terhindarkan.
16	Enni Lindia Mayona (2021)	Konsep Ecological City dalam Kerangka Konsep Ekologi Kota dan Kota Berkelanjutan	Hasil penelitian ini mengungkapknam bahwa dalam pendekatan urban ecology, ecocity dapat disimpulkan sebagai konsep yang menyeimbangkan ekologi kota (ecology of cities) dengan adanya struktur dan fungsi ekosistem, yang mana manusia berperan pada penentuan proses adaptasi dan perkembangan kota. Dalam konsep kota berkelanjutan seiring dengan perkembangan eco-form yang merepresentasikan pertimbangan ekologi di dalam ruang kota dan komunitas menunjukkan bentuk kota (urban form) merupakan salah satu unsur yang bisa dipengaruhi guna mencapai tujuan kota yang berkelanjutan. Ecocity sebagai eco-form berada di dalam tantangan konflik antara aspek lingkungan sosial dimana konflik yang terjadi mengalami pergeseran daridevelopment <i>conflict</i> ke arah green <i>conflict</i> di dalam prisma berkelanjutan. Hasil peneletian juga mengungkapkan

			<p>yakni diperlukannya pertimbangan serius hubungan antara manusia yang menjadi aspek sosial pada interaksi dengan ekosistem (sosial-ekologi) pada keadilan suatu kota yang menjadi landasan pada penyediaan <i>ecosystem services</i> dan infrastruktur hijau perkotaan pada proses pengelolaan lingkungan kota yang berwawasan lingkungan (<i>ecocity</i>). Dengan memperhatikan dan menghubungkan aspek tersebut, maka keadilan ekologis akan dapat tercipta pada <i>ecocity</i>.</p>
--	--	--	--

Bedasarkan tinjauan pustaka pada tabel diatas terdapat 16 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat 2 penelitian terdahulu dengan studi kasus WALHI, yakni Safira Fitranza (2022) Komunikasi Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Melalui E-Newsletter dalam Isu Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia Tahun 2019 dan Irhash Ahmady, Ari Ganjar Herdiansah, dan Husin Al-Banjari (2022) Gerakan Lingkungan dan Partai Politik: Studi Tentang Perjuangan Walhi dalam Pembentukan Partai Hijau. Terdapat 3 penelitian terdahulu terkait *NGO* dan gerakan lingkungan yakni, David Ardhian, Soeryo Adiwibowo, dan Ekawati Sri Wahyuni (2016) Peran dan Strategi Organisasi Non Pemerintahan dalam Arena Politik

Lingkungan Hidup, Yety Rochwulaningsih (2017) *Dinamika Gerakan Lingkungan dan Global Environmental Governance*, Alfian Hidayat (2017) *Konstruksi Gerakan Sosial : Efektivitas Gerakan dan Lingkungan Hidup*. Terdapat 2 penelitian terdahulu terkait *NGO* dan gerakan lingkungan dengan studi kasus, yakni Muhammad Wahyudi (2022) *Relasi Pemerintah-Gerakan Sosial: Studi pada Gerakan Lingkungan Jelantah4change dan Etha Pasan* (2018) *Politik Pengelolaan Karst Sangkulirang-Mangkalihat: Non Governmental Organization dan Agenda Kelestarian Lingkungan*. Terdapat 9 penelitian terdahulu terkait *IKN*, 5 diantaranya terkait pembangunan *IKN* secara ekologi yakni, dan Hendra Saputra (2022) *Framing Wacana Politik Ekologis: Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Negara Baru Indonesia* Dadang Jainal Mutaqin, Muhajah Babny Muslim, dan Nur Hygiawati Rahayu (2021) *Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara*, Subarudi (2022) *Kebutuhan Standar Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru: Antara Konsepsi dan Impelemtasi*, Chandra Adjie Prianggodo (2023) *Pembangunan IKN Sebagai Mercusuar Strategis (Kajian Kritis dalam Perspektif Sustainable Development)*, dan Robi Cahyadi Kurniawan & Fitria Barokah (2022) *Masa Depan Ekologi Ibu Kota Negara Baru*, 1 penelitian terdahulu terkait konsep kota ekologi, yakni Enni Lindia Mayona (2021) *Konsep Ecological City dalam Kerangka Konsep Ekologi Kota dan Kota Berkelanjutan*, Budiman, E. Letizia Dyastari, Rita Kala Linggi, Anwar Alaydrus, serta 2 penelitian terdahulu terkait aturan dan hukum yakni, Yanti Fristikawati (2023) *Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota*

Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum dan Yanti Fristikawati, Rainer Alvander, dan Verrence Wibowo (2022) Pengaturan dan Penerapan Sustainable Development pada Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Berbagai penelitian terdahulu yang telah dikelompokkan diatas, sangatlah berkaitan dengan penelitian ini.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan hasil penelitiannya menggunakan tabel, penelitian yang saat ini diambil dengan judul Gerakan Lingkungan dalam Upaya Politik Mewujudkan Kelestarian Ekologi di Ibu Kota Nusantara (IKN): Studi Kasus WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) akan lebih berfokus untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya politik yang dilakukan oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai NGO (Non Governmental Organization) dalam mewujudkan kelestarian ekologi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

F. Kerangka Teori

1. Gerakan lingkungan

Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian rumusan masalah, penelitian ini akan menggunakan perspektif konstruktivisme untuk melihat konstruksi gerakan lingkungan. Konstruksi dengan menggunakan instrument wacana, ide-ide dan agen penyelamatan lingkungan melalui pola dan upaya-upaya maupun program kerja yang dijalankan. Konstruksi gerakan perlawanan dalam prespektif konstruktivisme dapat dilihat melalui struktur sosial yang dipahami oleh

Alexander Wendt dengan tiga tahapan (Jacskon & George Sorensen, 1999) yakni, pengetahuan bersama, sumber daya material serta praktek.

Konstruksi pergerakan yang dilakukan gerakan lingkungan adalah dengan melakukan komunikasi tentang pengetahuan menyangkut hal-hal dampak dan ancaman terhadap permasalahan lingkungan yang akan timbul nantinya dari agenda-agenda industrialisasi. Konstruksi pengetahuan ini, juga dilakukan dengan model-model yang transformatif dengan menggunakan kekuatan-kekuatan budaya lokal serta gambar-gambar dan foto yang populer dan mudah dimengerti untuk memberikan pandangan mengenai degradasi lingkungan itu sendiri. Bangunan struktur sosial selanjutnya adalah sumber daya material, asumsi-asumsi permasalahan yang akan terjadi tentunya membangun sebuah persepsi ancaman bagi keberlangsungan sumber daya material. Disinilah struktur sosial mampu dilihat ketika masing-masing aktor menjadi bagian dalam kesatuan identitas dalam perlawanan terhadap agenda-agenda industrialisasi yang destruktif. Struktur sosial inilah yang membentuk perilaku aktor, baik individu atau negara yang terbentuk bukan saja dari aspek material namun juga aspek non material, yaitu norma dan ide. Sistem nilai, keyakinan dan gagasan dipandang memiliki struktur yang kuat dalam mempengaruhi tindakan sosial dan politik. Aspek material baru akan bermakna apabila tindakan yang dilakukan aktor itu melalui struktur nilai dan ide yang sama (Burchill, 2005). Struktur norma dan ide inilah yang menjadi landasan terbentuknya identitas sosial aktor-aktor politik.

Dalam tradisi berfikir konstruktivisme juga memperlihatkan dimensi intersubjektivitas, dimana identitas dan kepentingan yang terbentuk dipengaruhi oleh struktur sosial. Perlawanan gerakan lingkungan atas kebijakan pemerintah memiliki identitas dan kepentingan kompetitif yang berbeda dengan pemerintah sehingga akan terus terjadi kompetisi dan konfrontatif. Dalam konteks penelitian ini, ide-ide yang skeptis maupun pesimis terhadap agenda-agenda industrialisasi akan menjadi bagian dari perlawanan. Inilah perlawanan konstruksi antara gerakan lingkungan di level kelompok kepentingan dan elit pada level negara. Sebagai gerakan yang memiliki prespektif dan kepentingan global, gerakan lingkungan dapat membangkitkan konstruksi ide, nilai, dan norma untuk mencapai kepentingan global yang diharapkan. Ini dikuatkan oleh Wendt dalam (Jacskon & George Sorensen, 1999) bahwa interaksi negara dan kelompok kepentingan akan terus berlangsung dikarenakan kepentingan yang selalu dibentuk oleh pola dan tingkah laku identitas kolektif itu sendiri.

Aksi kolektif, politik, dan wacana yang dikelompokkan atas nama environmentalisme sangat beragam sebagai gagasan gerakan yang menantang. Akan tetapi, dinamika teori dan praktik yang mencirikan environmentalisme ini sebagai bentuk baru dari gerakan sosial yang terdesentralisasi, beraneka ragam, berorientasi pada jaringan, dan meluas sifatnya. Environmentalisme adalah praktik ekologi dan ekologi bagian dari bahasan teori environmentalisme. (Manuel Castell, 1966) juga telah memetakan pergerakan lingkungan ini dalam beberpa tipologi. Pembagian

tipologi ini, berdasarkan partisipasi secara langsung dalam mengamati praktik pergerakan lingkungan selama dua dekade, di tingkat internasional. Baginya, membuat tipologi ini berlaku umum, walaupun sebagian besar contoh diambil dari Amerika Utara dan Jerman karena menurutnya dua negara tersebut mewakili gerakan lingkungan yang paling maju di dunia, dalam hal telah dipetakan untuk memudahkan identifikasi model gerakan lingkungan, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2. *Typology of Environmental Movements*

Typology of Environmental Movements			
Type (Example)	Identity	Adversary	Goal
Conservation of nature (Group of Ten, USA)	Nature lovers	Uncontrolled development	Wilderness
Defense of own space (Not in my Back Yard)	Local community	Polluters	Quality of life/health
Counterculture, deep ecology (Earth First!, Ecofeminism)	The green self	Industrialism, technocracy, and patriarchy	Ecotopia
Save the planet (Greenpeace)	Internationalist eco-warriors	Unfettered global development	Sustainability
Green politics	Concerned	Concerned	Counterpower

(Sumber: Manuel Castells "The Power of Identity: (1996); A John Wiley & Sons, Ltd., Publication)

Bagan di atas disinergikan dengan penamaan gerakan lingkungan untuk setiap jenis, dan memberikan contoh gerakan yang paling sesuai untuk setiap jenis. Tentu, dalam gerakan atau organisasi tertentu mungkin ada campuran karakteristik. Pembagian ini dipilih, untuk tujuan menganalisa gerakan-gerakan yang dianggap mendekati tipe ideal dalam praktik dan wacana aktual gerakan-gerakan tersebut. Pertama, gerakan konservasi alam Konservasionis (*conservationist*), yakni *NGO* yang memiliki kepedulian utama pada perlindungan alam atau suatu area alam tertentu. Kedua, kelompok "*Environmental Defense Fund*". Gerakannya lebih fokus pada lobi, analisis, dan penyebaran informasi. Mereka sering mempraktikkan politik koalisi, tetapi berhati-hati agar tidak terbawa arus fokus lingkungan politik praktis, tidak mempercayai ideologi radikal dan aksi spektakuler yang tidak sejalan dengan mayoritas opini publik. Tipe *NGO* ini cenderung moderat dalam melakukan pelbagai aktivitas lingkungan. Ketiga, gerakan Eko-feminisme, melihat perempuan sebagai korban kekerasan patriarkal, sama seperti apa yang ditimbulkan pada alam. Jadi, pemulihan hak alamiah tidak dapat dipisahkan dari pembebasan perempuan. Keempat, "*Greenpeace*". Kelompok ini adalah organisasi lingkungan terbesar di dunia, dan mungkin yang paling mempopulerkan masalah lingkungan global, dengan tindakan langsung yang berorientasi pada media dan tanpa kekerasan. Kelima, *Green politics*²¹, pada awalnya tidak tampak dan tidak lahir secara spesifik menjadi semacam gerakan, namun lebih tepatnya memasuki ranah politik elektoral atas nama

environmentalisme.

NGO lingkungan dengan model gerakan instrumental memiliki tujuan yang berada di luar gerakan itu sendiri. (Heijden, 1922) membedakan *NGO* dengan model gerakan ini ke dalam tiga tipologi berikut:

a. Konservasionis (*conservationist*), yakni *NGO* yang memiliki kepedulian utama pada perlindungan suatu area alam tertentu.

b. Pengkampanye kebijakan (*the policy campaigners*), yakni *NGO* yang mencoba mempengaruhi para pembuat kebijakan lingkungan. Mengkampanyekan suatu kebijakan lingkungan merupakan kegiatan utamanya. Tipe *NGO* ini biasanya juga merupakan penasehat dalam pembuatan kebijakan dan secara finansial didukung oleh para pemegang otoritas. *NGO* ini secara umum memiliki kecenderungan moderat.

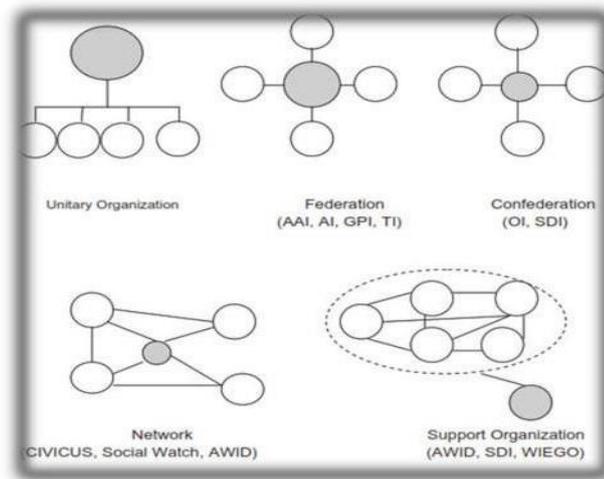
c. Mobilisator (*the mobilisers*), yakni *NGO* yang aktivitas utamanya menggerakkan publik dalam suatu aksi lingkungan. Aksi ini biasanya ditujukan kepada pemegang otoritas atau pelaku bisnis yang keputusan atau perilakunya membahayakan lingkungan.

Berdasarkan komparasi tipologi tersebut, dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan klasifikasi tipologi dari Heijden untuk melihat WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) termasuk dalam tipologi *NGO* lingkungan dengan model gerakan seperti apa.

2. Atikulasi Kepentingan *NGO*

Organisasi Non Pemerintah atau *NGO* (*Non-Governmental Organization*) secara umum merujuk pada lembaga atau institusi yang

dibentuk oleh masyarakat sipil tanpa ada campur tangan atau keterkaitan dengan negara. Selain itu *NGO* juga biasanya dibentuk dengan tujuan-tujuan khusus yang menjadi alasan mengapa mereka didirikan. Setidaknya, *NGO* memiliki 3 karakteristik utama yakni: 1) tidak dibentuk oleh negara, 2) bergerak dalam dan memiliki kepedulian terhadap bidang yang spesifik, 3) memiliki nilai/tujuan yang independen dari campur tangan negara (Betsill & Corell, 2008:4) posisi *NGO* dalam politik kontemporer tidak bisa lagi dianggap sebagai pelengkap dan marjinal. Bahkan dalam beberapa kasus, *NGO* memainkan peran penting dalam pengidentifikasian serta penyelesaian masalah atau isu-isu besar yang menjadi perhatian masyarakat dunia (Brown, Ebrahim & Batliwala, 2011:1098-1108). Brown, Ebrahim dan Batliwala menyebutkan bahwa dalam mencapai tujuannya *NGO* melakukannya melalui berbagai pola yang mereka sebut sebagai pola artikulasi kepentingan *NGO*. Mereka mengidentifikasi 5 pola artikulasi kepentingan *NGO* yakni: 1) Pola Kesatuan, 2) Pola Federasi, 3) Pola Konfederasi, 4) Pola Jaringan dan 5) Pola Dukungan..Pola artikulasi kepentingan *NGO* dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Pola Artikulasi Kepentingan NGO

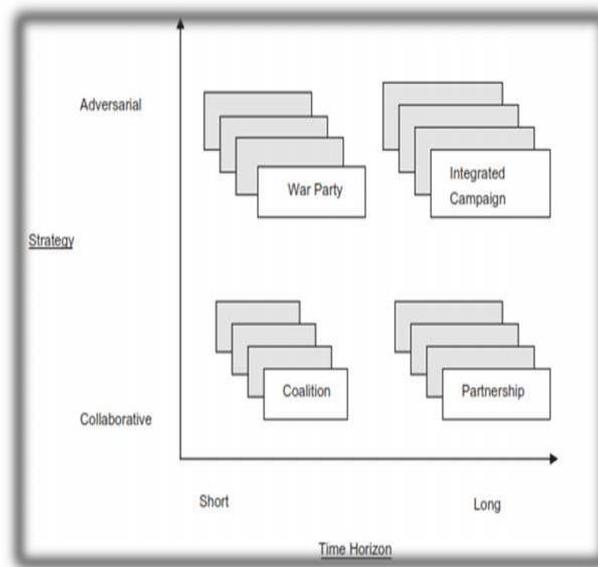
Sumber: L.David Brown, Alnoor Ebrahim and Srilatha Batliwala.

Governing International Advocacy NGOs. No. 06 Vol. 40.

pp-1098-1108

Pola kesatuan memiliki ciri bahwa pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya organisasi dilakukan oleh struktur yang paling atas atau dapat disebut sebagai sekretariat pusat. Pola federasi di sisi lain merupakan gabungan antara berbagai unit yang membentuk suatu organisasi besar yang kemudian dikomando oleh sekretariat pusat, namun kewenangan sekretariat pusat terhadap unitnya tidak sebesar pada pola kesatuan. Pola konfederasi hampir serupa dengan pola federasi namun yang membedakannya adalah sekretariat pusat tidak memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan unit sehingga memiliki kekuasaan yang terbatas. Pola jaringan merupakan gabungan organisasi yang berbagi nilai, informasi dan tujuan bersama, dan biasanya bersifat adhoc. Terakhir

adalah pola dukungan di mana organisasi berperan sebagai pendukung yang berupaya untuk melobi aktor-aktor penting bagi pencapaian tujuan. Pola artikulasi kepentingan pada akhirnya akan menentukan bagaimana strategi advokasi yang akan dilakukan oleh setiap organisasi. Berikut merupakan strategi dan target *NGO*:



Gambar 2. Strategi dan Target Advokasi *NGO*

Sumber: L. David Brown, Alnoor Ebrahim and Srilatha Batliwala.

Governing International Advocacy NGOs. No. 06 Vol. 40.

pp-1098-1108

Sebagaimana diterangkan pada gambar diatas, setidaknya ada dua strategi dari advokasi *NGO* dalam pencapaian tujuannya yakni dengan bekerjasama atau melawan. Tentu saja bekerjasama dalam konteks ini adalah bekerjasama dengan pihak pemerintah/pihak lain yang

menghalangi tujuan mereka dengan harapan bisa merubah posisi serta pandangan mereka sehingga tercipta keselarasan kepentingan. Sebaliknya strategi lainnya adalah melawan.

Dalam mengartikulasikan kepentingannya suatu kelompok kepentingan juga memiliki 4 (empat) peranan dalam kehidupan bernegara yaitu (1) katalisasi perubahan sistem dengan cara melakukan advokasi dan berusaha membentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap masalah-masalah yang penting dalam kehidupan. Melalui peran ini, kelompok kepentingan berusaha mengembangkan kemauan politik dan inisiatif masyarakat sehingga dapat bersama-sama mempengaruhi kebijakan; (2) Monitoring atau melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Melakukan kritik hingga memprotes apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum oleh pejabat negara; (3) memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan. Kelompok kepentingan ini kerap membela masyarakat umum yang kerap menjadi korban kekerasan dan korban ketidakadilan hukum oleh pemerintah, dan (4) mewujudkan sejumlah program dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Gaffar, 1999: 204). Dalam penyampaian kepentingan, kelompok kepentingan bisa jadi berubah menjadi kelompok penekan apabila upaya penyampaian tuntutan disampaikan secara intensif dengan cara melancarkan taktik-taktik dan tekanan politik yang luar biasa untuk mempengaruhi kebijakan, sehingga pemerintah maupun pejabat politik bersedia menyetujui tuntutan mereka (Duverger, 1984: 123). Ada

pun taktik atau strategi gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau organisasi dalam menyampaikan mengartikulasikan kepentingannya melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. Menyampaikan tuntutan/aspirasi kepada partai politik
- b. Partisipasi dalam proses perumusan kebijakan
- c. Melakukan lobby dan negosiasi kepada pejabat politik
- d. Memanfaatkan hubungan pribadi dengan elit politik
- e. Penyampaian kritik dan aspirasi melalui media massa
- f. Gerakan non konvensional, mengartikulasikan kepentingannya dengan cara melakukan kekerasan seperti melakukan demonstrasi, aksi mogok, memblokir jalan, konvoi besar-besaran dan melakukan tindak kekerasan lainnya.

3. Kota Ekologi

Ekologi adalah ilmu yang mendalami terkait interaksi antara organisme satu sama lain serta lingkungannya (G.T.Muller, 1975). Ekologi dalam perkotaan berarti menyangkut tentang bagaimana hubungan antara suatu kota dengan lingkungannya. Kehidupan yang terjadi di suatu kota tentu harus diiringi dengan adanya pembangunan dan pengembangan kota. Namun, dalam prosesnya diperlukan atensi terhadap aspek lingkungan agar tidak rusak, karena manusia dalam hidup juga berdampingan dengan makhluk lain seperti organisme, tumbuhan, pohon maupun alam. Dilihat dari perjalanannya bahwa alam telah memberikan berbagai hal kepada manusia berupa sumber daya dan sebagainya, oleh karenanya

manusia harus nya menjaga kelestarian nya dan jangan merusak alam ataupun mengeksploitasinya. Diperlukan suatu kota yang ekologis yang mampu meminimalisir dampak ekologis dalam membangun bangunan-bangunan serta sarana yang aman, seimbang, hemat energi (Kumurur, 2000). Lingkungan hidup yang baik akan berdampak baik kepada masyarakat. Hal ini juga sebagai faktor terciptanya kota yang ideal dan merupakan hak masyarat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik.

Pembangunan kota dengan berkelanjutan serta tetap menjaga kelestarian ekologi sangatdiperlukan dalam suatu kota. Pembangunan dan pengembangan yang berkelanjutan adalah proses pembangunan yang mengedepankan hasil akhir sebagai sebuah tujuan. Tujuan akhir tersebut adalah sebuah kota dapat dinikmati lintas generasi dan tidak membunuh generasi penerus. Dalam arti lain, pemanfaatan dan pelestarian SDA dalam suatu kota harus benar-benar dijaga (Kumurur, 2000). Upaya dalam kota berkelanjutan ini bisa dilakukan dengan cara dipenuhinya kebutuhan saat ini ekonomi masyarakat, sosial, budaya, lingkungan, kesehatan, dan hak politik masyarakat. Lebih lanjut, upaya dalam kota berkelanjutan harus berorientasi kedepan yang mana agar generasi selanjutnya dapatmemenuhi kebutuhannya seperti meminimalkan penggunaan dan tidak mengekspolitasi sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, pemanfaatan daur ulang, limbah organik tidak melewati kapasitas sungai, dan pembatasan limbah anorganik (Kumurur, 2000)

Sebuah kota merupakan bentuk yang lebih kecil dari suatu negara.

Bagaimana kualitas SDM dan sinergi pemerintah kota dengan berbagai elemen dalam masyarakatnya lah yang menjadi faktor pembangunan kota berkelanjutan dapat tercapai dan berjalan dengan baik. Idealnya sebuah kota adalah sebuah tempat yang layak huni dengan transportasi modern, sanitasi yang layak, manajemen sampah yang bagus, terdapat RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang cukup, minim polusi, kualitas lingkungan yang baik, kelengkapan dan kualitas sarana prasana public (Imanda, 2015). Menurut (Kementerian PUPR, 2019) idealnya sebuah kota ditentukan oleh beberapa indikator. Indikator ini juga harus diperhatikan dalam pengimplementasian pembangunan ibu kota negara baru. Menurut kementerian PUPR dalam prosiding “Kota Untuk Semua”, beberapa indikator tersebut yakni terkait Kependudukan, Pelayanan Perkotaan, Pengembangan Ekonomi Perkotaan, Tata Kelola Pemerintahan, Mobilitas dan Perumahan. Idealnya pembangunan sebuah kota baiknya mengacu pada aspek yang sudah dituliskan diatas. Pembangunan yang tidak direncanakan dan dieksekusi secara baik hanya akan menimbulkan berbagai permasalahan untuk kota. Patut diantisipasi, bahwa berbagai permasalahan yang ada pada ibu kota lama harus dijadikan analisa dan pembelajaran agar tidak terulang di IKN (Ibu Kota Negara) baru. Mengingat, munculnya satu masalah apabila tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan masalah lain akibat banyak keterkaitan akan hal tersebut.

Keseimbangan pembangunan kota berkelanjutan sangat diperlukan untuk mempertahankan pelestarian alam dan lingkungan. era modern telah

merubah mindset dari kota-kota di dunia untuk menciptakan konsep berkelanjutan seperti: *Sustainable City*, *Green city*, *Eco City* dalam rangka mengantisipasi dampak sensitif lingkungan (Mutaqin, 2021). *Ecocity* merupakan konsep kota yang berkembang seiring dengan perkembangan perspektif sejarah ekologi kota dan kompleksitas permasalahan lingkungan kota. *Ecocity* diharapkan dapat menjadi konsep yang mampu menjawab tantangan isu lingkungan kota dan dianggap penting dengan pertimbangan suatu kota yang berkelanjutan. *Ecocity* pada awal dikembangkan merupakan model pemukiman manusia yang memiliki struktur dan fungsi ekosistem alami yang mandiri dan berkelanjutan. Konsep tersebut mengintegrasikan keanekaragaman alam dan budaya dalam desain yang terintegrasi melalui penggunaan teknologi (Register, 2006; (Roseland, 1997). Konsep *Ecocity* adalah konsep yang berkembang seiring dengan paradigma dan gerakan-gerakan *appropriate technology (AT)*, *community economic development (CED)*, *social ecology*, *the green movement*, *bioregionalism* dan *sustainable development* (Roseland, 1997). *Ecocity* jika dibandingkan dengan bentuk kota *neotraditional*, *urban containment*, dan *compact city* memiliki keunggulan nilai di kriteria ecological design, dan penyediaan energi terbarukan (Y. R. Jabareen, 2006). *Ecocity* merupakan bentuk kota yang menitikberatkan pada konsep evolusi, co-existence, adaptasi dan resiliensi masyarakat dalam struktur dan fungsi kota, efisiensi penggunaan energi, upaya mengurangi kerusakan terhadap alam dan menciptakan *attractive environments* bagi masyarakat (Register

(2006), (Roseland, 1997), (Gaffron & Skala, 2005), (Hes & Bush, 2018).

Di dalam konsep *Ecocity* terdapat 4 pilar penting yang dikembangkan yaitu *urban design*, *bio-geophysical conditions*, *socio-cultural features*, *ecological imperatives* yang didukung oleh 18 standar untuk mengukur pencapaian kondisi *ecocity* (Ecocity Builders, 2016).

4. Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional adalah penjelasan yang menggambarkan suatu konsep secara abstrak dengan sistematis dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman, serta mendorong pemikiran secara kritis. Berikut definisi konseptual dalam penelitian ini :

a. Gerakan Lingkungan

Gerakan lingkungan adalah upaya kolektif yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat secara luas untuk mempromosikan maupun mengkomunikasikan terkait berbagai ancaman dan dampak yang ada terhadap permasalahan lingkungan dengan penuh pemahaman, kesadaran, dan tindakan yang bertujuan untuk melindungi, melestarikan, atau memperbaiki lingkungan alam sekitar.

b. Artikulasi Kepentingan *NGO*

Artikulasi kepentingan *NGO* adalah proses dalam organisasi yang dibuat masyarakat non pemerintahan dengan tanpa adanya andil dari pemerintah maupun negara. Proses tersebut dilakukan dengan melakukan pengungkapan pemahaman, dan penyampaian kepentingan dengan strategi tertentu melalui individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat dalam

suatu isu sesuai kepentingannya.

c. Kota Ekologi

Kota ekologi adalah suatu konsep kota yang dirancang dan dibangun dengan memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan dengan secara proaktif juga meminimalkan kerusakan lingkungan, demi terwujudnya kelestarian ekologi yang berkelanjutan, serta pemukiman dan lingkungan hidup yang sehat dan alami.

5. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah elemen yang paling esensial dalam penelitian ini, karena di dalamnya terdapat panduan tentang bagaimana mengukur variabel tertentu dalam konteks penelitian. Bagian ini akan menentukan indikator variabel dan cara untuk mengukur variabel tersebut

Tabel 3. Definisi Operasional

Teori	Variabel	Indikator
Artikulasi Kepentingan	Gerakan Konvensional	a. Menyampaikan tuntutan/aspirasi kepada partai politik b. Partisipasi dalam proses perumusan kebijakan c. Melakukan lobby dan negosiasi kepada pejabat politik d. Memanfaatkan hubungan pribadi dengan elit politik e. Penyampaian kritik dan aspirasi melalui media massa

	Gerakan Non Konvesional	f. melakukan kekerasan seperti melakukan demonstrasi, aksi mogok, memblokir jalan, konvoi besar-besara dan melakukan tindak kekerasan lainnya.
--	-------------------------	--

G. Metode Penelitian

1. Metode dan Jenis penelitian

Metode dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati” (Sugiyono, 2014). Peneliti tertarik melakukan penelitian ini, karena peneliti mengetahui dan meyakini pentingnya mewujudkan kelestarian ekologi di suatu wilayah, terlebih di wilayah Ibukota Nusantara, dan salah satu peran penting dalam mewujudkan hal itu, yakni *NGO (Non Governmental Organization)* melalui gerakan lingkungan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Dalam hal ini, peneliti mengamati dan menganalisa bagaimana upaya-upaya politik yang dilakukan oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai *NGO (Non Governmental Organization)* dalam mewujudkan kelestarian ekologi di Ibu kota Nusantara (IKN). Harapannya lebih masifnya gerakan lingkungan di Indonesia, kemudian pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat menjadi lebih mengerti dan sada terkait isu lingkungan, khususnya isu ini, sehingga dapat turut membantu dalam terwujudnya kelestarian ekologi di IKN (Ibu Kota

Nusantara) dengan melihat perspektif atau gagasan gerakan lingkungan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian ini memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang terjadi pada saat ini, dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa” (Salim, 2006). Data didapatkan melalui kajian pustaka, melalui dokumen-dokumen resmi yang mencatat keadaan yang terjadi dalam suatu objek penelitian, berupa majalah, hasil-hasil studi, thesis, maupun hasil survey baik dari instansi pemerintah maupun tidak (Hasan, 2002). Melalui metode ini, peneliti bakal menjeaskan hasil dari penelitian sesuai rumusan masalah dan teori artikulas kepentingan yang digunakan secara komprehensif dengan studi kasus WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Hasil analisis data berupa penyajian data secara deskriptif terkait kondisi dan situasi terkini dan faktual yang sedang terjadi dan telah diteliti yang ditampilkan dan dijelaskan basilnya dalam kajian naratif agar lebih mudah dipahami pembaca. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menganalisa bagaimana upaya-upaya politik yang dilakukan oleh gerakan lingkungan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dalam mewujudkan kelestarian ekologi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

2. Subjek Penelitian

Kelestarian ekologi di suatu wilayah merupakan isu hangat yang sering muncul pada suatu kota. Terlebih, IKN (Ibu Kota Nusantara) dengan

berbagai tantangan dan ancaman terkait isunya. Dalam hal ini, peneliti berupaya melihat bagaimana upaya-upaya politik yang dilakukan oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai NGO (*Non Governmental Organization*) dalam mewujudkan kelestarian ekologi di IKN. Peneliti akan menggunakan teori Artikulasi Kepentingan untuk menjaikan hasil penelitian terkait bagaimana upaya-upaya politik yang dilakukan oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari narasumber utama dan langsung, sehingga data ini merupakan data yang paling utama memerlukannya. Dalam penelitian ini memerlukan data primer untuk mengetahui secara lebih detail dan rinci terkait upaya-upaya politik yang dilakukan oleh gerakan lingkungan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dalam mewujudkan kelestarian ekologi di IKN (Ibu Kota Nusantara). Untuk data primer sendiri peneliti akan melakukan pengambilan data melalui proses interview ataupun wawancara dengan aktor – aktor yang dianggap terlibat dalam isu ini.

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan peneliti kepada narasumber untuk memperoleh informasi secara rinci dan detail. Data diperoleh dengan wawancara yang dilakukan terhadap Direktur Manajer, dan Staff WALHI yang ikut serta dalam upaya politik yang dilakukan oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dalam

mewujudkan kelestarian ekologi di IKN (Ibu Kota Nusantara). Wawancara dijadwalkan dan dilaksanakan dengan waktu tertentu melalui aplikasi zoom atau pertemuan online. Wawancara dilaksanakan dengan terstruktur dengan daftar list pertanyaan yang sudah dibuat, kemudian akan ditambahkan pertanyaan lanjutan bila dibutuhkan. Selain itu, ada juga penjelasan langsung kondisi faktual yang terjadi di IKN oleh salah satu anggota WALHI yang tinggal di sekitar wilayah tersebut.. Wawancara ini dilakukan kepada 4 narasumber yakni, Nur Wahid Satrio (Manajer Kajian Kebijakan Divisi Kajian Hukum dan Lingkungan Walhi Nasional) pada 23 Februari 2024; Fathur Roziqin Fen (Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur) dan Yudi Syahputra (Staff Agraria Walhi Kalimantan Timur) pada 23 Februari 2024; dan Parid Ridwanuddin (Manajer Kampanya Pesisir dan Laut Divisi Kampanye Anti Industri Ekstraktif Walhi Nasional) pada 2 Maret 2024 yang dilandaskan pada kebutuhan proses penelitian yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan dokumen / data yang *release* untuk publik di tengah masyarakat. Data ini menjadi data pendukung dari data primer yang sudah disajikan oleh berbagai media, penulis, maupun peneliti. Data sekunder diambil dari proses pengumpulan jurnal penelitian, web resmi WALHI, dokumen berita, dan lainnya dari internet. Penulis juga menjabarkan penelitian yang terkait dengan penelitian ini dengan tabel, serta mencantumkan hasil penelitian. Penelitian sebelumnya tentu menjadi

referensi rujukan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan literatur pustaka dari beberapa sumber seperti buku, jurnal dan laporan berita terkait.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah hal yang diperlukan pada penelitian dan sangat penting dalam penelitian ini. Dari analisis data inilah yang kemudian akan menghasilkan penemuan, baik penemuan substansif maupun formal. Hal ini berfungsi untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. (Miles & Huberman, 1992). Tiga tahapan yang harus dilaksanakan untuk analisis data penelitian kualitatif yakni, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verifying*).hal ini tertulis dalam buku yang ditulis oleh Imam Gunawan.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pengurangan, penyederhanaan, abstraksi data yang didapat dari penelitian. Reduksi data adalah disusunnya lagi dokumen / data supaya data yang ditambihkan semakin fokus dan membuat mudahnya proses analisis yang dilakukan. Data yang sudah direduksi akan membuat abstraksi yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data yang dilakukan. Penemuan yang dianggap kurang mempunyai arti maupun pola yang

jelas, kemudian akan juga menjadi fokus analisis, karena penelitian kualitatif tujuannya, yakni mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang terlihat

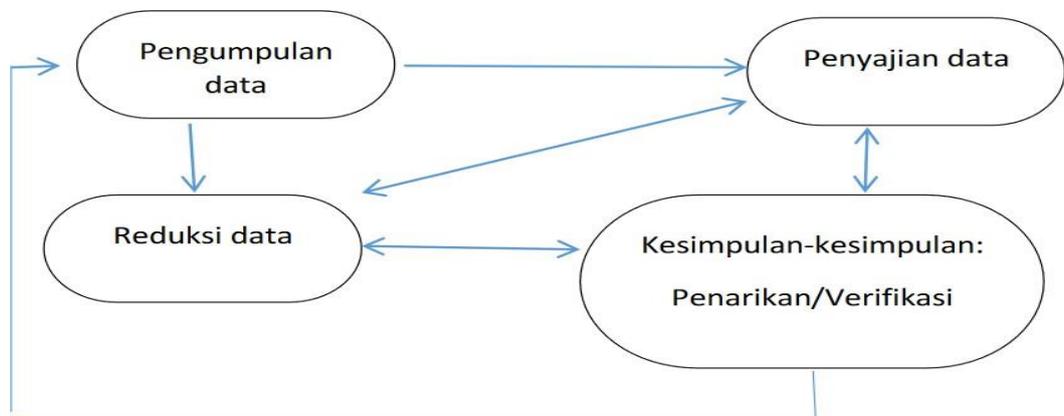
b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Pada penelitian kualitatif hal yang sering dipakai adalah teks bersifat naratif. Dengan melakukan penyajian data, maka sangat memberikan kemudahan dan membantu memahami bagaimana kondisi yang terjadi dan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis.

c. Verifikasi data dan Kesimpulan

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji kebenarannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan penulis dalam verifikasi data adalah melakukan

penggunaan penulisan yang tepat dan sesuai data. Proses pengolahan data dilakukan, yang kemudian dianalisis dan diperiksa kebenarannya untuk disimpulkan. Penarikan kesimpulan digunakan guna mempermudah pembaca memahami hasil penelitian yang sudah dijawab pada pembahasan dengan rumusan masalah yang ada dan analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan ditampilkan secara deskriptif dengan objek penelitian yang diteliti merujuk pada teori dan hasil penelitian. Dengan adanya verifikasi dan kesimpulan pada data, maka akan menghasilkan data yang lebih akurat dan akan dipahami pembaca dengan lebih mudah. Berikut adalah proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini:



Gambar 3. Analisis Proses Data Penelitian Kualitatif